

ABSTRAK

Penetapan tersangka adalah salah satu langkah hukum dalam tahap penyelidikan yang memiliki dampak hukum terhadap hak serta posisi individu dalam proses hukum pidana. Untuk alasan ini, penetapan tersangka harus mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama mengenai pemenuhan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah serta pemeriksaan terhadap individu yang dicurigai. Fokus dari penelitian ini adalah pada legalitas penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 38/PID. Pra/2023/PN. Sby yang berhubungan dengan kasus jual beli tanah milik desa, terutama berkaitan dengan ada tidaknya laporan polisi dan surat perintah penyidikan ganda mengenai objek yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penetapan tersangka dengan aturan hukum acara pidana dan mengevaluasi pertimbangan hakim praperadilan dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa secara formal, hakim praperadilan memutuskan bahwa penetapan tersangka adalah sah, karena penyidik dianggap telah memenuhi syarat minimum dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Namun, dalam proses penyelidikan, terdapat masalah terkait pemeriksaan terhadap pemohon yang sebelumnya hanya dilakukan sebagai saksi, serta adanya laporan polisi dan surat perintah penyidikan yang ganda terhadap objek yang sama. Situasi ini menimbulkan kebingungan dalam dasar penyelidikan dan dapat mempengaruhi kepastian hukum dalam penetapan tersangka. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 38/PID. Pra/2023/PN. Sby secara formal dinyatakan sah oleh hakim praperadilan, namun secara normatif masih ada kekurangan dalam aspek prosedur dan konsistensi administrasi penyelidikan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan konsistensi dari penyidik dalam melaksanakan proses penyelidikan agar penetapan tersangka dapat benar-benar sesuai dengan regulasi hukum acara pidana yang berlaku.

Kata kunci: Penetapan Tersangka, Praperadilan, Penyidikan, Tanah Kas Desa, Hukum Acara Pidana.

ABSTRACT

Determining a suspect is a legal step in the investigation phase that has legal implications for an individual's rights and position in the criminal justice process. Therefore, suspect determination must comply with the regulations stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHP), particularly regarding the provision of at least two valid pieces of evidence and the examination of the suspect. This study focuses on the legality of suspect determination in Decision Number 38/PID.Pra/2023/PN.Sby, which relates to the sale and purchase of village land, particularly regarding the existence of multiple police reports and investigation warrants concerning the same object. The purpose of this study is to analyze the compliance of suspect determination with criminal procedure law and to evaluate the pretrial judge's considerations in making a decision in this case. The methodology applied is normative legal research with a statutory and case-based approach. The legal sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed descriptively and qualitatively. The research findings indicate that formally, the pretrial judge ruled that the suspect determination was valid, as the investigator was deemed to have met the minimum requirement of two pieces of evidence as stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. However, during the investigation, issues arose regarding the examination of the applicant, who had previously only been conducted as a witness, as well as the existence of multiple police reports and investigation warrants for the same object. This situation created confusion regarding the basis of the investigation and could impact legal certainty in the suspect determination. From the research results, it can be concluded that the suspect determination in Decision Number 38/PID. Pra/2023/PN. Sby was formally declared valid by the pretrial judge, but normatively, there were still shortcomings in the procedural aspects and consistency of the investigation administration. Therefore, investigators require caution and consistency in carrying out the investigation process to ensure that the suspect determination is fully compliant with applicable criminal procedural law regulations.

Keywords: Suspect Determination, Pretrial, Investigation, Village Treasury Land, Criminal Procedural Law.